

Tren Global Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah: Perspektif Bibliometrik

Ahmad Muhardin Hadmar (1), Irwan Madamang (2), Hasdinawati (3)

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjay

Email Korespondensi: ahmadmuhardin@gmail.com

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren dalam publikasi ilmiah tentang partisipasi masyarakat dan tata kelola lokal dari tahun 2015 hingga 2024, menggunakan basis data Scopus. Sebanyak 231 dokumen dianalisis berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci yang relevan. Visualisasi bibliometrik dilakukan dengan bantuan perangkat VOSViewer dan platform MapChart. Alat ini digunakan untuk memetakan publikasi tahunan, kontribusi negara, penulis, institusi, dan topik utama. Hasil temuan menunjukkan peningkatan tren publikasi dengan puncaknya pada 2024 (29 dokumen). Amerika Serikat dan Indonesia mendominasi kontribusi publikasi, sedangkan Molyneux S menjadi penulis paling produktif. Sumber paling sering dikutip adalah jurnal *PLOS ONE* dan *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Tiga institusi utama yang berkontribusi antara lain *Centers for Disease Control and Prevention*, *University of Newcastle*, dan *Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health*. Hasil studi ini menunjukkan bahwa “community participation” menjadi istilah sentral, terutama dalam konteks tata kelola, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Partisipasi masyarakat terbukti memberikan dampak signifikan dalam pembangunan, pelayanan kesehatan responsif, dan penguatan kapasitas komunitas di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam konteks lokal serta peran teknologi digital dalam memperkuat tata kelola partisipatif.

Kata kunci: Analisis Bibliometrik, Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Riset Tren Global, Scopus

Abstract: This study aims to analyze trends in scientific publications on community participation and local governance from 2015 to 2024, using the Scopus database. A total of 231 documents were analyzed based on title, abstract, and relevant keywords. Bibliometric visualization was performed using the VOSViewer tool and the MapChart platform. These tools were used to display annual publications, country contributions, authors, institutions, and main topics. The findings show an increasing publication trend with a peak in 2024 (29 documents). The United States and Indonesia dominated publication contributions, while Molyneux S was the most prolific author. The most frequently cited sources were the journal *PLOS ONE* and the *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. The three main contributing institutions were the *Centers for Disease Control and Prevention*, *Newcastle University*, and the *Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health*. The results of this study indicate that “community participation” is a central term, especially in the context of governance, health, and sustainable development in developing countries. Community participation has been shown to have a significant impact on growth, responsive health services, and strengthening community capacity at the local level. Further research is recommended to explore community participation in local contexts and the role of digital technologies in strengthening participatory governance.

Keywords: Bibliometric Analysis; Community Participation; Global Trends Research; Local Government; Scopus

Article History :

Received 25-07-2025; Revised 27-08-2025; Accepted 30-09-2025

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah menjadi sangat penting dalam banyak negara demokrasi di dunia. Sejak tahun 60-an, telah banyak penelitian yang

membahas tentang konsep partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (Tramontano, 2021). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat sipil (Pellini & Ayres, 2007). Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat akar rumput menjadi sangat krusial perumusan kebijakan (Ajibola & Ibrahim, 2022). Partisipasi tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Di tengah tuntutan global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Isaura, 2020). Salah satu aspek penting dalam mendukung hal tersebut adalah partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, keterlibatan warga tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik (Riyanto & Kovalenko, 2023). Partisipasi aktif ini dapat diwujudkan melalui forum musyawarah, konsultasi publik, hingga mekanisme pengaduan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, kemampuan untuk merespons tantangan sosial, politik, dan ekonomi merupakan komponen krusial yang tidak dapat diabaikan (Susila Wibawa, 2019). Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat, merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola yang demokratis. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban nasional, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai tata kelola yang lebih akuntabel terhadap kebutuhan lokal (Riyanto & Kovalenko, 2023). Oleh karena itu, mendorong mekanisme partisipasi masyarakat merupakan tujuan dalam setiap langkah pengambilan keputusan kebijakan daerah.

Seiring perkembangan teknologi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah kini dapat difasilitasi melalui berbagai platform digital, seperti e-participation, e-musrenbang, aplikasi pengaduan online, serta media sosial (Hassan & Hamari, 2019; Karuniawati & Fanida, 2015; Prasetyaningtias et al., 2018). Hal ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan memantau kinerja pemerintah secara real-time (Meza et al., 2024). Namun, pemanfaatan teknologi dalam partisipasi publik masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan akses digital dan rendahnya literasi digital masyarakat lokal (Otong Husni Taufiq, Dini Yuliani, 2018). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan turut menjadi kendala dalam mewujudkan partisipasi digital yang inklusif.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis. Berbagai studi telah menyoroti peran strategis partisipasi warga, terutama dalam konteks perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Madzivhandila & Maloka (2014), dalam penelitiannya yang berjudul *“Community Participation in Local Government Planning Processes: A Paramount Step Towards a Successful Service Delivery”*, menekankan bahwa tersedianya sarana partisipasi dalam proses *Integrated Development Planning* (IDP) merupakan langkah krusial untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Sementara itu, (Michels & de Graaf, 2010) dalam artikelnya *“Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy”* menegaskan bahwa meskipun peran warga sering kali terbatas pada penyampaian informasi, partisipasi

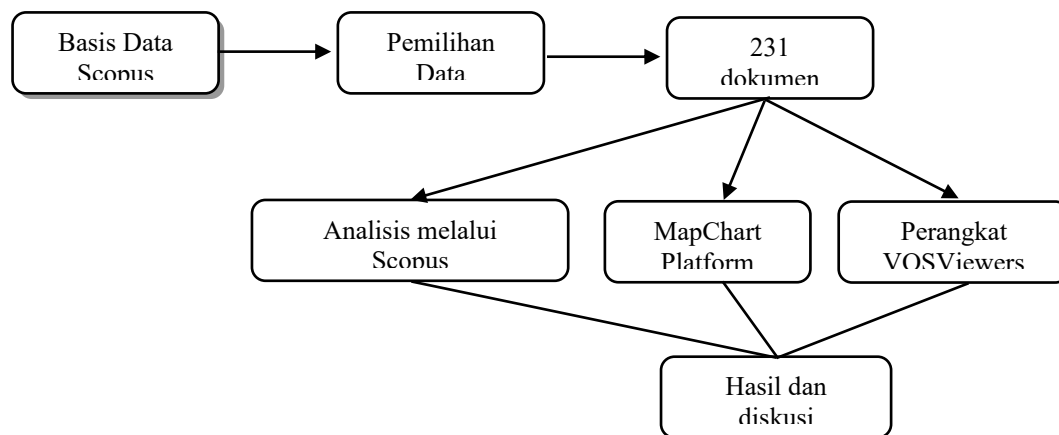
tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan demokrasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Dalam dekade terakhir, literatur tentang partisipasi publik menunjukkan perkembangan pendekatan, seperti e-government, open government dan penggunaan teknologi digital dalam e-participation (Draheim, 2020; Klopp et al., 2013; Wilson, 2020). Meski kajian tentang partisipasi publik dalam pemerintah daerah terus meningkat, masih sedikit yang secara sistematis memetakan tren global penelitian dalam bidang ini. Berdasarkan data dari Scopus menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah publikasi terkait “public participation in local government”, terutama setelah tahun 2015. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi publik di tingkat lokal menjadi topik yang semakin relevan, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah secara komprehensif (Nunes Silva, 2020). Studi ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis tren global mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Melalui pendekatan bibliometrik, kajian ini akan mengidentifikasi pola penelitian yang berkembang, tema-tema dominan, serta kontribusi ilmiah yang telah dihasilkan dalam satu dekade (Hadmar et al., 2024). Oleh karena itu, pemetaan tren riset secara sistematis diperlukan guna mengidentifikasi gap research terhadap penelitian tentang partisipatif masyarakat di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti catatan, buku, makalah, artikel, dan jurnal ilmiah (Linnenluecke et al., 2020). Sumber data dikumpulkan dari database Scopus dalam rentang waktu tahun 2015 hingga 2024. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian adalah “community participation” dan “local government”, yang difokuskan pada bagian judul, abstrak, dan kata kunci artikel. Publikasi penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah dari tahun 2015 hingga 2024 sebanyak 231 dokumen. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup tren publikasi tahunan, kontribusi negara, bidang studi, penulis, sumber yang dikutip, topik yang relevan, afiliasi institusi, serta makalah yang paling banyak dirujuk (Subekti et al., 2022). Gambar 1 menyajikan langkah-langkah dalam proses pengumpulan serta analisis data yang bersumber dari database Scopus.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan platform MapChart sebagai alat bantu visualisasi geografis untuk menampilkan distribusi publikasi global, sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebaran topik atau tren penelitian secara spasial (Işık et al., 2022). Selain itu, perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan dan memvisualisasikan pola bibliografi. Sebagai perangkat lunak bibliometrik, VOSviewer memberikan penekanan pada representasi visual peta dan jaringan bibliometrik yang dibangunnya (Subekti et al., 2022). Visualisasi ini melibatkan hubungan jaringan antara artikel ilmiah, penulis, jurnal, dan kata kunci, guna mengidentifikasi perkembangan riset yang relevan dengan topik penelitian. Hasil pemetaan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap tren, keterkaitan, dan kontribusi literatur terhadap tema kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Publikasi Ilmiah Global

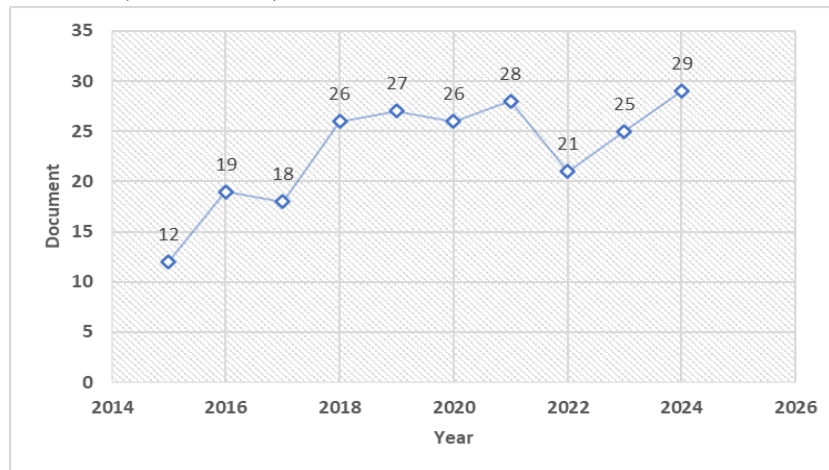
Dalam konteks kajian ilmiah, tren publikasi global tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah terus meningkat hingga saat ini. Dalam dekade terakhir, terjadi fluktuasi dalam jumlah publikasi terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Fluktuasi publikasi penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dinamika kebijakan pemerintahan, desentralisasi, serta pendekatan partisipatif dalam sistem pemerintahan daerah (Ali et al., 2024; Schneider, 2007; Tsofa et al., 2017). Sehingga, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memetakan tren publikasi global terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil temuan, publikasi ilmiah global dari database Scopus menunjukkan hasil yang beragam. Temuan awal mengidentifikasi sebanyak 231 dokumen yang relevan dengan topik “*community participation*” dan “*local government*” dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Temuan ini mencerminkan beragam perspektif yang berkembang dalam literatur ilmiah. Penelitian ini mengklasifikasikan data mulai dari tahun dokumen, negara yang paling banyak menyumbang publikasi ilmiah, sumber jurnal, penulis, keluaran institusi, dan afiliasi dokumen.

Perkembangan Publikasi Tahunan

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menjadi topik yang semakin relevan dalam beberapa tahun terakhir. Relevansi ini dipengaruhi oleh pesatnya

perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah (Winter & Le, 2020). Untuk memahami dinamika perhatian ilmiah terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, analisis tren tahunan publikasi ilmiah menjadi langkah penting. Pola publikasi dari tahun ke tahun mencerminkan seberapa besar minat akademik terhadap isu tersebut dalam konteks global. Berdasarkan data dari database Scopus, berikut adalah jumlah publikasi yang relevan dengan topik ini dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2024).



Gambar 2. Tren Dokumen berdasarkan Tahun

Sumber: Database Scopus (2025)

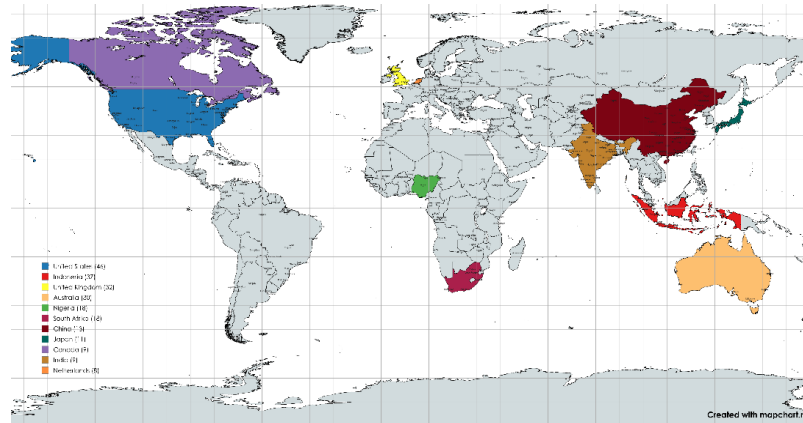
Gambar 2 diatas menunjukkan data publikasi ilmiah terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah selama periode 2015 hingga 2024. Secara umum, hasil penelusuran menunjukkan tren publikasi global yang meningkat, namun terdapat fluktuasi antar tahun. Pada tahun 2015, jumlah publikasi tercatat sebanyak 12 dokumen. Angka ini mengalami peningkatan secara bertahap dalam kurun waktu sepuluh tahun. Lonjakan yang cukup tinggi terjadi antara tahun 2016 hingga 2019, yang menunjukkan peningkatan konsisten dari 19 menjadi 27 publikasi. Meskipun sempat menurun pada tahun 2022, tren kembali naik pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 29 publikasi.

Temuan ini mengindikasikan semakin tingginya perhatian akademik terhadap isu partisipasi masyarakat, seiring dengan berkembangnya pendekatan tata kelola yang demokratis dalam pemerintahan daerah. Upaya ini menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan publik (Mashamaite & Madzivhandila, 2014). Fluktuasi yang terjadi mencerminkan dinamika kebijakan, konteks politik lokal, maupun pergeseran fokus penelitian global terhadap isu partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di daerah.

Kontribusi Negara

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sebaran geografis penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, analisis kontribusi tiap negara menjadi langkah penting. Identifikasi negara-negara yang paling aktif mempublikasikan karya ilmiah di bidang ini tidak hanya mencerminkan tingkat perhatian akademik, tetapi juga menunjukkan konteks sosial-politik yang mendorong partisipasi publik. Visualisasi distribusi

ini disajikan menggunakan platform MapChart, yang memungkinkan representasi spasial yang lebih jelas dan informatif mengenai kontribusi global terhadap pengembangan wacana partisipatif dalam tata kelola pemerintahan daerah (Işık et al., 2022). Distribusi kontribusi negara dalam publikasi ilmiah terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah divisualisasikan melalui Gambar 3.

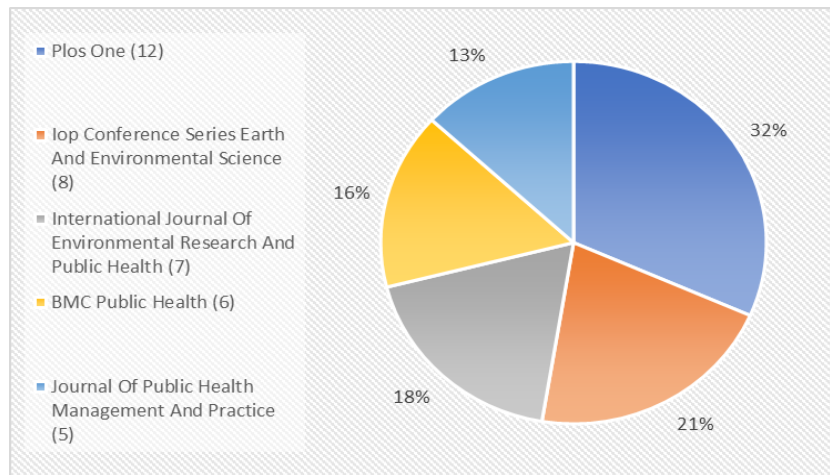


Gambar 3. Distribusi Kontribusi Negara menggunakan MapChart

Sumber: Database Scopus (2025)

Hasil penelusuran menggunakan database Scopus menunjukkan bahwa terdapat 52 negara yang berkontribusi dalam penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Gambar 3 menggambarkan distribusi kontribusi global dengan menyoroti 11 negara teratas berdasarkan jumlah publikasi terbanyak. Amerika Serikat memimpin dengan (46), diikuti Indonesia dengan (37), Inggris Raya (32), dan Australia (30) publikasi. Negara-negara Global South seperti Nigeria dan Afrika Selatan (18 publikasi), serta negara Asia seperti China (13) dan Jepang (11) publikasi. Hasil temuan ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap isu partisipasi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Seiring meningkatnya isu partisipasi masyarakat di berbagai negara, praktik desentralisasi dalam pemerintahan daerah semakin menjadi perhatian global (Ahmad & Abu Talib, 2015). Tingginya jumlah publikasi dari negara seperti Amerika Serikat, Indonesia, Inggris Raya, dan Australia menunjukkan bahwa partisipasi warga dipandang sebagai kunci keberhasilan desentralisasi. Di negara berkembang, minat ini terkait dengan upaya meningkatkan kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas (Adebayo & Butcher, 2021). Berdasarkan database Scopus, terdapat 154 sumber yang mempublikasikan topik tersebut. Gambar 4 menampilkan lima sumber dengan jumlah publikasi terbanyak.



Gambar 4. Tren Publikasi Tahunan berdasarkan Sumber

Sumber: Database Scopus (2025)

Gambar 4 menunjukkan bahwa isu partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah menjadi perhatian khusus dari berbagai disiplin ilmu. PLOS ONE tercatat sebagai sumber dengan jumlah publikasi terbanyak, yaitu sebanyak 12 publikasi. Jurnal ini memuat berbagai studi yang mengaitkan partisipasi warga dengan isu kebijakan lokal, kesehatan, serta pembangunan berbasis masyarakat.

Ada korelasi yang kuat antara partisipasi masyarakat dan kebijakan kesehatan publik, terutama dalam perencanaan program berbasis komunitas, menurut International Journal of Environmental Research and Public Health (7 publikasi) dan BMC Public Health (6 publikasi). Sementara itu, lima artikel dalam Journal of Public Health Management and Practice menunjukkan peran warga dalam pengelolaan layanan kesehatan di tingkat lokal.

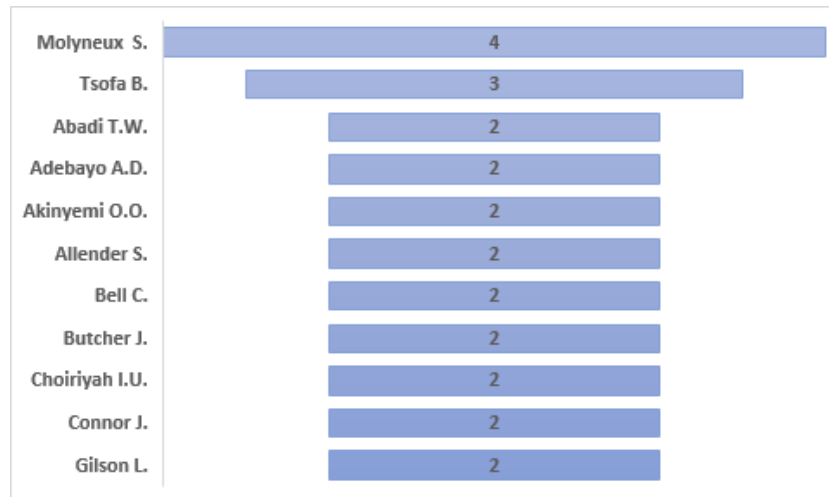
Selanjutnya, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science menyumbang 8 publikasi yang umumnya membahas partisipasi dalam konteks pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. International Journal of Environmental Research and Public Health (7 publikasi) serta BMC Public Health (6 publikasi) memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara partisipasi masyarakat dan kebijakan kesehatan publik, terutama dalam hal perencanaan program berbasis komunitas. Sementara itu, Journal of Public Health Management and Practice dengan 5 publikasi, menyoroti peran warga dalam pengelolaan layanan kesehatan di tingkat lokal.

Penulis Kontributor Teratas

Topik penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah telah banyak dikaji dalam berbagai studi ilmiah yang terindeks di database Scopus. Gambar 5 menyajikan sepuluh penulis paling produktif dalam meneliti topik tersebut.

Berdasarkan data publikasi yang terindeks dalam database Scopus, topik mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti dari berbagai negara. Penulis paling produktif dalam bidang ini adalah Molyneux S. dengan 4 publikasi, diikuti oleh Tsofa B. yang memiliki 3 publikasi. Selanjutnya, terdapat sembilan penulis lainnya yang masing-masing memiliki 2 publikasi, yaitu Abadi T.W., Adebayo A.D., Akinyemi O.O., Allender S., Bell C., Butcher J., Choiriyah I.U., Connor J., dan Gilson L. Distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada dominasi mutlak dari satu penulis,

terdapat kontribusi yang konsisten dari beberapa peneliti utama (Kemeç & Altınay, 2023). Selain itu, keberagaman latar belakang penulis mencerminkan bahwa isu partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah menjadi perhatian global yang ditanggapi secara serius dalam ranah akademik internasional.

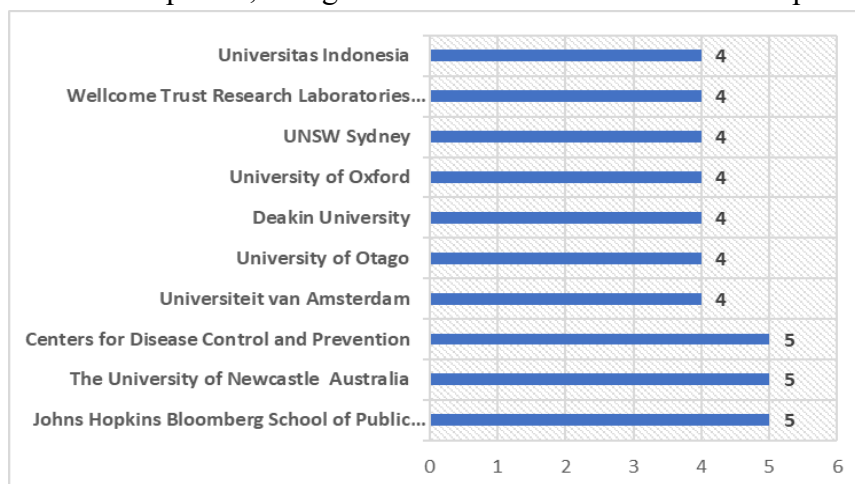


Gambar 5. Tren Publikasi berdasarkan Penulis

Sumber: Database Scopus (2025)

Analisis Afiliasi Kelembagaan

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan dukungan kelembagaan dari berbagai institusi akademik di seluruh dunia. Afiliasi institusi memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas peneliti melalui fasilitas, pendanaan, serta kolaborasi ilmiah (Seto et al., 2024). Gambar 6 berikut menyajikan sepuluh institusi teratas yang paling aktif berkontribusi dalam publikasi ilmiah terkait topik ini, sebagaimana tercatat dalam database Scopus.



Gambar 6. Tren berdasarkan Afiliasi Penelitian

Sumber: Database Scopus (2025)

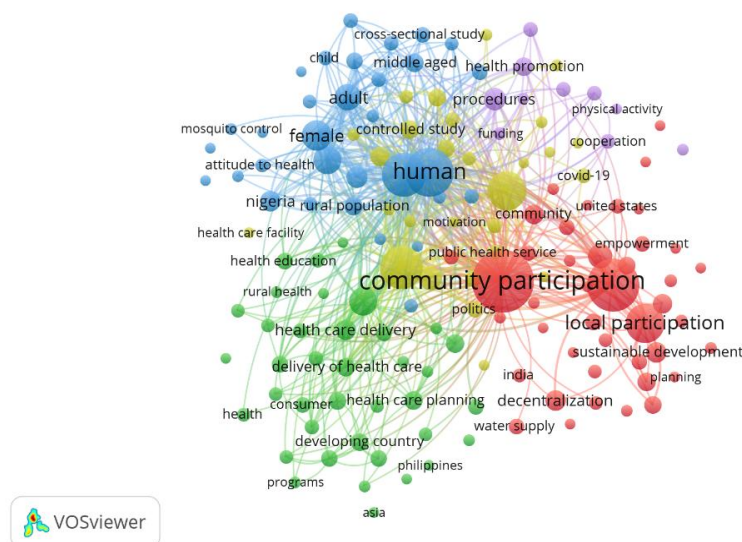
Gambar 6 menggambarkan kontribusi berbagai institusi terhadap penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Tiga institusi terkemuka, yaitu Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, The University of Newcastle, dan Centers for

Disease Control and Prevention, masing-masing memiliki kontribusi yang sangat signifikan dengan 5 publikasi atau penelitian terkait. Selain itu, institusi seperti Universiteit van Amsterdam, University of Otago, Deakin University, University of Oxford, UNSW Sydney, Wellcome Trust Research Laboratories Nairobi, dan Universitas Indonesia, masing-masing memiliki 4 publikasi.

Interaksi lintas sektor turut memengaruhi pola partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah (Madzivhandila & Maloka, 2014). Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa berbagai afiliasi institusi turut aktif berkontribusi dalam penelitian terkait, meskipun beberapa di antaranya memiliki jumlah publikasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan tiga institusi utama. Secara keseluruhan, temuan ini mencerminkan pentingnya peran institusi global dan nasional dalam mengkaji partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, dengan kontribusi yang tersebar luas di berbagai belahan dunia.

Pemetaan Visualisasi Jaringan, Overlay Visualisasi, dan Kepadatan Visualisasi

Penting untuk dipahami bahwa visualisasi memainkan peran krusial dalam menggambarkan pola hubungan, kekuatan koneksi, dan intensitas kolaborasi antar elemen dalam suatu sistem (Kemeç & Altınay, 2023). Pendekatan visual memungkinkan peneliti untuk menemukan struktur jaringan, dinamika interaksi, dan posisi strategis aktor penting. Beberapa jenis visualisasi yang sering digunakan dalam konteks ini adalah mapping visualisasi jaringan, visualisasi overlay, dan visualisasi densitas. Masing-masing dari jenis visualisasi ini menawarkan perspektif yang berbeda untuk menggambarkan struktur jaringan dan tingkat keterhubungan antar komponen yang dianalisis.



Gambar 7. Visualisasi Jaringan

Sumber: Visualisasi data penelitian menggunakan VOSviewer (2025)

Gambar 7 menunjukkan 150 kata kunci yang diidentifikasi yang dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok. Melalui penelusuran database Scopus, terdapat 2.766 kata kunci yang teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 kata kunci memenuhi ambang batas minimum frekuensi kemunculan, yakni delapan kali atau lebih. Berikut ini disajikan

ringkasan mengenai kluster, warna, dan item-item terkait sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Kluster, Warna, dan Item Terkait

Kluster ID	Warna	Item	Total Item
#1	Merah	Bangladesh; Kapasitas; studi kasus; Cina; masyarakat; masyarakat; pengembangan; Psm; Desentralisasi; pengambilan keputusan; demokrasi; negara berkembang; Ekonomi; pengembangan; Pemberdayaan; manajemen lingkungan; perencanaan lingkungan; perlindungan lingkungan; pemerintahan; pendekatan tata kelola; program kesehatan; India; pemerintah daerah; partisipasi lokal; partisipasi; pendekatan partisipatif; perencanaan; pembuatan kebijakan; jurnal prioritas; kebijakan publik; analisis kualitatif; penilaian risiko; daerah pedesaan; modal sosial; Afrika Selatan; pemangku kepentingan; keberlanjutan; pembangunan berkelanjutan; Inggris; Amerika Serikat; daerah perkotaan; perencanaan kota; pengelolaan limbah; pasokan air	42
#2	Hijau	Afrika; Afrika selatan Sahara; Asia; pengendalian penyakit menular; perawatan komunitas; layanan kesehatan masyarakat; Konsumen; partisipasi konsumen; pemberian perawatan kesehatan; negara berkembang; negara berkembang; ekonomi; pendidikan; manajemen keuangan; Kesehatan; pembantu kesehatan; pemberian perawatan kesehatan; personel perawatan kesehatan; perencanaan perawatan kesehatan; kualitas perawatan kesehatan; pendidikan kesehatan; perencanaan kesehatan; layanan kesehatan; Jasa kesehatan; direksi; metodologi; organisasi dan administrasi; organisasi dan manajemen; Filipina; perawatan kesehatan primer; evaluasi program; Program; partisipasi publik; riset; kesehatan pedesaan; faktor sosioekonomik; Tanzania	38
#3	Biru	Remaja; dewasa; Umur; binatang; sikap terhadap kesehatan; kesadaran; anak; studi komparatif; studi cross-sectional; studi cross-sectional; Demografi; Berdarah; perempuan; pengetahuan kesehatan, sikap, praktik; survei kesehatan; rumah tangga; manusia; manusia; Indonesia; pengetahuan; laki-laki; paruh baya; pengendalian nyamuk; Nigeria; Persepsi; kehamilan; kuesioner; penduduk pedesaan; sosial ekonomi; survei dan kuesioner; populasi perkotaan; dewasa muda	32
#4	Kuning	Artikel; studi terkontrol; penyakit virus corona 2019; Covid-19; epidemiologi; kelompok fokus; pemerintah; akses perawatan kesehatan; fasilitas perawatan kesehatan; kebijakan perawatan kesehatan; kesetaraan kesehatan; kebijakan kesehatan; pemrosesan informasi; komunikasi interpersonal; wawancara; Kenya; pimpinan; studi klinis utama; motivasi; Pandemi; kebijakan; politik; psikologi; kesehatan masyarakat; layanan kesehatan masyarakat; penelitian kualitatif; tanggung jawab; dukungan sosial	28
#5	Ungu	Australia; koperasi; perilaku kooperatif; Pendanaan; promosi	10

Kluster ID	Warna	Item	Total Item
		kesehatan; eksperimen manusia; Lingkungan; aktivitas fisik; Prosedur; wawancara semi-terstruktur	

Sumber: Analisis Menggunakan Perangkat Lunak VOSviewer (2025)

Tabel 1 diatas menunjukkan hasil analisis bibliometrik terhadap 150 item yang memenuhi ambang batas minimum frekuensi kemunculan. Setelah analisis, item-item ini dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan jumlah kata kunci bersama yang ditemukan dalam dokumen yang sama. Dengan total kekuatan link 21.542, terdapat 6.093 tautan yang menunjukkan hubungan antar item. Angka ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antar kata kunci dalam jaringan; nilai kekuatan tautan yang lebih tinggi menunjukkan seberapa kuat hubungan antar item dalam literatur yang dianalisis. Klasterisasi ini membantu dalam menentukan tema-tema utama yang mendominasi penelitian tentang topik yang dikaji.

Hasil analisis bibliometrik yang dilakukan menggunakan VOSviewer menghasilkan lima klaster utama yang mewakili fokus penelitian dalam bidang pemerintahan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Klaster pertama (warna merah) menampilkan tema penting tentang tata kelola pemerintahan partisipatif, pembangunan berkelanjutan, dan keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Berbagai item seperti *community participation*, *governance*, *sustainable development* menunjukkan bahwa penelitian dalam klaster ini umumnya berfokus pada upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Boripis et al., 2024; De Los Santos, 2016; Madzivhandila & Maloka, 2014).

Klaster kedua (warna hijau) mencakup berbagai penelitian mengenai sistem pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang. Fokus utama dalam klaster ini terletak pada manajemen kesehatan, partisipasi publik, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam konteks partisipasi masyarakat, istilah seperti *primary health care*, *public participation*, dan *health planning* mencerminkan fokus penelitian terhadap penguatan sistem pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa klaster tersebut mewakili upaya untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas (Mukiga et al., 2024).

Klaster ketiga (warna biru) berfokus pada penelitian yang menggunakan pendekatan demografis untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi persepsi, sikap, dan pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu kesehatan. Penelitian dalam klaster ini umumnya menggunakan survei sebagai metode utama untuk mengumpulkan data terkait perilaku dan pemahaman masyarakat. Isu-isu kesehatan yang menjadi fokus meliputi penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan kesehatan individu. Fokus kajian dalam klaster ini meliputi topik seperti *dengue*, *pregnancy*, *health knowledge*, *attitudes*, *practice*, serta keterlibatan kelompok usia dan jenis kelamin yang beragam (Lin & Efranto, 2023).

Sementara itu, klaster keempat (kuning limau) secara khusus berfokus pada penelitian tentang kebijakan kesehatan dan respons pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Klaster ini mencakup topik seperti kebijakan kesehatan, kesehatan publik, pandemi, dan penelitian

kelola yang demokratis di tingkat lokal (Riyanto & Kovalenko, 2023). Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka visualisasi ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsentrasi antar konsep dalam studi tentang partisipasi masyarakat. Temuan ini menguatkan argumen bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam berbagai domain pembangunan, terutama dalam konteks kesehatan, tata kelola lokal, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembangunan. Tercatat sebanyak 231 publikasi artikel yang telah terindeks Scopus pada tahun 2015 hingga 2024 terkait topik penelitian. Terjadi fluktuasi publikasi dalam rentan waktu tersebut, namun cenderung meningkat dengan tahun 2024 (29 publikasi) menjadi puncaknya. Amerika Serikat dan Indonesia menjadi negara dengan kontribusi penelitian terbanyak. Selain itu, Molyneux S menjadi penulis yang paling banyak menyumbang penelitian ilmiah dengan topik partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Afiliasi institusi Centers for Disease Control and Prevention, University of Newcastle, dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public masing-masing turut berkontribusi dengan 4 publikasi.

Berdasarkan hasil temuan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap 150 dari 2.766 kata kunci yang diidentifikasi di database Scopus. Melalui visualisasi jaringan menunjukkan bahwa tema penelitian dalam bidang pemerintahan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan terstruktur dalam lima klaster utama. Kelima klaster tersebut, membahas tentang tata kelola pemerintahan partisipatif, sistem pelayanan kesehatan negara berkembang, analisis demografis masalah kesehatan, kebijakan kesehatan terkait pandemi COVID-19, dan promosi kesehatan berbasis komunitas. Kata kunci “community participation” muncul sebagai pusat fokus, menegaskan peran penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola inklusif. Tren penelitian dari 2015 hingga 2024 mengindikasikan peningkatan perhatian akademik terhadap partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan pergeseran paradigma menuju tata kelola yang lebih demokratis terhadap tantangan sosial-ekonomi di negara dunia. Temuan ini menguatkan argumen bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, pelayanan kesehatan yang responsif, dan penguatan kapasitas komunitas di tingkat daerah.

REFERENSI

- Adebayo, A. D., & Butcher, J. (2021). Constraints And Drivers of Community Participation and Empowerment in Tourism Planning and Development in Nigeria. *Tourism Review International*, 45(2–3), 209–227. <https://doi.org/10.3727/154427221X16098837280000>
- Ahmad, M. S., & Abu Talib, N. B. (2015). Empowering local communities: decentralization, empowerment and community driven development. *Quality and Quantity*, 49(2), 827–838. <https://doi.org/10.1007/s11135-014-0025-8>
- Ajibola, W. A., & Ibrahim, G. W. (2022). Infrastructural Development in Yewa South Local Government Area in Ogun State, Nigeria. *Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications*, 8(34), 39–43. <https://doi.org/10.5935/jetia.v8i34.808>
- Ali, A., Analoui, F., & Sage, N. (2024). Decentralization as spectacle: An empirical reflection

- from Pakistan. *Development Policy Review*, 42(6). <https://doi.org/10.1111/dpr.12806>
- Boripis, T., Pathak, S., Pongjinda, W., & Ling, J. C. Y. (2024). Community Participation Process for the Sustainable Business Development of Local Wisdom Learning Centers. *Journal of Human, Earth, and Future*, 5(4), 660–673. <https://doi.org/10.28991/HEF-2024-05-04-09>
- De Cocker, K., Dubuy, V., De Bourdeaudhuij, I., Maes, L., Seghers, J., Lefevre, J., De Martelaer, K., Buytaert, B., & Cardon, G. (2016). Health Policy Development in Flemish Small-Sized Municipalities: A Real-World Intervention. *Health Promotion Practice*, 17(5), 656–667. <https://doi.org/10.1177/1524839916654130>
- De Los Santos, M. C. M. (2016). Local government units' environmental governance for economic sustainability. In V. D. & K. N. (Eds.), *Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, ICMLG 2016* (pp. 68–75). Academic Conferences Limited. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84969204376&partnerID=40&md5=40632764bf2bf9227b24778b72f71b48>
- Draheim, D. (2020). On Architecture of e-Government Ecosystems: From e-Services to e-Participation: [iiWAS'2020 Keynote]. In I.-S. M., P. E., S. I.L., S. M., K. I., & K. G. (Eds.), *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 3–10). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3428757.3429972>
- Forde, C. (2020). Participatory governance in Ireland: Institutional innovation and the quest for joined-up thinking. *Administration*, 68(3), 1–20. <https://doi.org/10.2478/admin-2020-0013>
- Hadmar, A. M., Nurmandi, A., Sadat, A., Loilatu, M. J., & Ibrahim, A. H. (2024). Trends in Digital Transformation for Multicultural E-Government Communication: A Bibliometric Analysis Using Citespace. *Nyimak: Journal of Communication*, 8(2), 241–260. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/11187>
- Hassan, L., & Hamari, J. (2019). Gamification of e-participation: A literature review. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2019-Janua*, 3077–3086. <https://doi.org/10.24251/hicss.2019.372>
- Isaura, G. (2020). *Kemitraan Global untuk Transparansi Pemerintah: Rencana Aksi Open Government Indonesia*. 58–66.
- Işık, C., Aydın, E., Dogru, T., Rehman, A., Sirakaya-Turk, E., & Karagöz, D. (2022). Innovation Research in Tourism and Hospitality Field: A Bibliometric and Visualization Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(13). <https://doi.org/10.3390/su14137889>
- Karuniawati, R. D., & Fanida, E. H. (2015). Effectiveness of Electronic Conference System Development Plan (E- Musrenbang) Tambaksari District. *Administrasi Negara*, 12040674260, 1–11.
- Kemeç, A., & Altınay, A. T. (2023). Sustainable Energy Research Trend: A Bibliometric Analysis Using VOSviewer, RStudio Bibliometrix, and CiteSpace Software Tools. *Sustainability (Switzerland)*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/su15043618>
- Klopp, J. M., Marcello, E. M., Kirui, G., & Mwangi, H. (2013). Negotiating e-politics: Initiating e-government in a municipal council in Kenya. *Information Polity*, 18(1), 21–42. <https://doi.org/10.3233/IP-130294>
- Lin, C. J., & Efranto, R. Y. (2023). Do Age and Gender Change the Perception of Workplace Social Sustainability? *Sustainability (Switzerland)*, 15(6), 1–15.

- <https://doi.org/10.3390/su15065013>
- Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. *Australian Journal of Management*, 45(2), 175–194. <https://doi.org/10.1177/0312896219877678>
- Madzivhandila, T. S., & Maloka, C. M. (2014). Community participation in local government planning processes: A paramount step towards a successful service delivery. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(16), 652–657. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n16p652>
- Mashamaite, K., & Madzivhandila, A. (2014). Strengthening community participation in the integrated development planning process for effective public service delivery in the rural limpopo province. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(25), 225–230. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n25p225>
- Meza, J., Jimenez-Pacheco, P., Vaca-Cardenas, L., & Munoz, E. (2024). Cognitive Urban Planning Enhancing Decision-Making in Local Governments. *Digital Government: Research and Practice*, 5(3). <https://doi.org/10.1145/3696008>
- Michels, A., & de Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. *Local Government Studies*, 36(4), 477–491. <https://doi.org/10.1080/03003930.2010.494101>
- Mukiga, A. K., Boadu, E. S., & Edson, T. (2024). Perceived Public Participation and Health Delivery in Local Government Districts in Uganda. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph21070820>
- Nunes Silva, C. (2020). Global Trends in Local Governance. In *Local and Urban Governance: Vol. Part F12* (pp. 1–19). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52516-3_1
- Otong Husni Taufiq, Dini Yuliani, D. H. (2018). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Combustion Science and Technology*, 21(5–6), 1–49. <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
- Pellini, A., & Ayres, D. (2007). Community participation in local governance in Cambodia: Learning from the village networks approach. *Development in Practice*, 17(3), 404–409. <https://doi.org/10.1080/09614520701337004>
- Prasad, S., & Bara, A. H. (2024). Community Participation in Elementary Education and COVID-19 Pandemic: A Case Study of Public Schools in Bihar. *Journal of Asian and African Studies*, 59(3), 828–841. <https://doi.org/10.1177/00219096221129437>
- Prasetyaningtias, T., Muslimah Az-Zahra, H., & Hendra Brata, A. (2018). Analisis Usability Pada Aplikasi Mobile E-Government Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Dengan Heuristic Evaluation. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(11), 4647–4653. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Sadat, A., & Lawelai, H. (2023). Modeling and innovation using artificial intelligence in accelerating handling the COVID-19 pandemic: A bibliometric study. *Masyarakat*,

- Kebudayaan Dan Politik*, 36(1), 58–71. <https://doi.org/10.20473/mkp.v36i12023.58-71>
- Sarmiento, O. L., Díaz del Castillo, A., Triana, C. A., Acevedo, M. J., Gonzalez, S. A., & Pratt, M. (2017). Reclaiming the streets for people: Insights from Ciclovías Recreativas in Latin America. *Preventive Medicine*, 103, S34–S40. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.07.028>
- Schneider, S. (2007). Constructing healthy municipalities: The dogma and dilemmas of decentralization in Mexico. *Urban Anthropology*, 36(4), 321–355. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-39449134247&partnerID=40&md5=00d950996543616322a668ca18ebd4e5>
- Seto, S., Okuyama, J., Iwasaki, T., Fukuda, Y., Matsuzawa, T., Ito, K., Takakura, H., Terada, K., & Imamura, F. (2024). Linking affected community and academic knowledge: a community-based participatory research framework based on a Shichigahama project. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-70813-9>
- Subekti, D., Nurmandi, A., & Mutiarin, D. (2022). Mapping Publication Trend of Political Parties Campaign in Social Media: A Bibliometric Analysis. *Journal of Political Marketing*, 0(0), 1–18. <https://doi.org/10.1080/15377857.2022.2104424>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Tramontano, M. (2021). City, culture, and urbanism: Learning from Asuncion. *Cidades*, 42, 98–113. <https://doi.org/10.15847/cct.21976>
- Tsofa, B., Molyneux, S., Gilson, L., & Goodman, C. (2017). How does decentralisation affect health sector planning and financial management? a case study of early effects of devolution in Kilifi County, Kenya Lucy Gilson. *International Journal for Equity in Health*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12939-017-0649-0>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jama, S. R. (2019). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kegiatan Karang Taruna. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.7546>
- Wilson, C. (2020). The socialization of civic participation norms in government?: Assessing the effect of the Open Government Partnership on countries' e-participation. *Government Information Quarterly*, 37(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101476>
- Winter, A. K., & Le, H. (2020). Mediating an invisible policy problem: Nottingham's rejection of congestion charging. *Local Environment*, 25(6), 463–471. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1753668>